

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Sekretariat Bersama Kartamantul adalah lembaga memfasilitasi, mengkoordinatori, dan memediasi kerja sama pengelolaan persampahan di Kawasan Kartamantul. Dalam menjalankan kerja samanya, Sekretariat Bersama Kartamantul melakukan 2 (dua) jenis mekanisme kerja sama, antara lain, mekanisme internal dan mekanisme dengan eksternal lembaga yang saling berkaitan dalam pelaksanaan kerja sama. Lembaga kerja sama antardaerah itu sendiri memiliki kinerja yang terkategori baik dengan skor penilaian 256,4. Skor tersebut termasuk dalam kategori baik karena untuk mencapai kategori yang lebih tinggi masih terdapat kriteria yang belum mendapat nilai penilaian maksimal. Kriteria yang belum mendapatkan nilai penilaian maksimal tersebut, antara lain transparansi, evaluasi berkala, efektivitas, efisiensi, perataan, kompetensi, dan integrasi. Sedangkan kriteria yang sudah mendapatkan nilai penilaian maksimal adalah akuntabilitas, partisipatif, dan sinergitas & saling menguntungkan. Nilai maksimal penilaian yang dapat diperoleh adalah 210.

Meskipun demikian, tingkat kinerja lembaga kerja sama antardaerah dalam pengelolaan persampahan di Kartamantul tersebut sudah terkategori baik. Faktor yang menjadi penentu tingkat kinerja lembaga kerja sama antardaerah dalam pengelolaan persampahan di Kawasan Kartamantul tersebut, antara lain intensitas komunikasi dan koordinasi yang rutin sehingga menyebabkan hubungan kerja sama yang terbangun itu harmonis, adanya komitmen bersama dari kabupaten/kota yang bekerja sama untuk terus mempertahankan kerja sama tersebut (meskipun ada pergantian kepemimpinan kepala daerah ataupun kepala instansi, hal tersebut tidak mempengaruhi komitmen yang sudah disepakati), adanya kapabilitas dari kabupaten/kota yang bekerja sama untuk melaksanakan program-program kerja sama yang telah disepakati, kerja sama yang dijalin terstruktur dan sistematis, dan kerja sama yang dijalin cukup mandiri dan transparan.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Dalam melakukan studi penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan yang menjadi kendala dalam proses analisis dan penyusunan laporan tugas akhir, keterbatasan tersebut antara lain:

- Data dan informasi lembaga yang dapat diakses terbatas sehingga kedalaman analisis penelitian belum terlalu maksimal

- Responden penelitian belum melibatkan masyarakat selaku tujuan akhir dari adanya kebijakan kerja sama antardaerah
- Belum tersedianya standar pelayanan minimal dalam konteks kerja sama antardaerah sehingga belum ada standar yang diakui secara bersama terkait sejauh mana seharusnya kerja sama antardaerah itu bisa dilakukan

### 5.3 Rekomendasi

Dari kesimpulan di atas maka dapat disusun rekomendasi yang dapat diberikan untuk lembaga kerja sama antardaerah Kartamantul dalam kaitannya dengan kinerja lembaga kerja sama antardaerah dalam pengelolaan persampahan di Kawasan Kartamantul. Rekomendasi tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu rekomendasi untuk lembaga kerja sama antardaerah Kartamantu dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Berikut merupakan rekomendasi yang diusulkan berdasarkan hasil penelitian ini:

a. Pemerintah dan lembaga kerja sama antardaerah Kartamantul

Rekomendasi yang dapat diberikan antara lain :

1. Untuk meningkatkan kinerja kriteria transparansi, lembaga kerja sama perlu memberikan kesempatan yang lebih luas lagi bagi masyarakat untuk mendapatkan akses data dan informasi lembaga dan pengelolaan persampahan. Kemudahan akses tersebut salah satunya dapat diwujudkan dengan penyediaan data yang dapat diakses secara *online* oleh masyarakat
2. Untuk meningkatkan kinerja kriteria evaluasi berkala, pemerintah kabupaten/kota yang bekerja sama perlu menunjuk staf khusus yang mengurus kerja sama dan pemerintah kabupaten/kota yang bekerja sama wajib untuk patuh pada hasil kesepakatan dan koordinasi. Selain itu dalam konteks pengelolaan persampahan, keberadaan TPS 3R dalam pemilahan dan pengolahan sampah perlu dioptimalkan untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Piyungan
3. Untuk meningkatkan kinerja kriteria efektivitas, lembaga kerja sama perlu segera merumuskan solusi penanganan dampak negatif bagi masyarakat di sepanjang rute pengangkutan sampah, penanganan titik-titik pembuangan sampah ilegal, dan optimalisasi TPS 3R di masing-masing kabupaten/kota dalam melakukan pemilahan dan pengolahan sampah untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Piyungan. Hal ini dimaksudkan agar tujuan kerja sama pengelolaan persampahan untuk membentuk sistem pengelolaan persampahan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan antara Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul dapat tercapai

4. Untuk meningkatkan kinerja kriteria efisiensi, lembaga kerja sama perlu segera mengusulkan perbaikan kepada pengelola TPA Piyungan terkait kondisi belum adanya penataan terhadap zona pembuangan sampah oleh pemerintah dan swasta yang kerap kemudian menimbulkan antrian dan menambah waktu tunggu karena faktor armada yang digunakan, dan timbangan di jembatan timbang TPA Piyung juga kerap kali belum sikron. Usulan perbaikan tersebut dimaksudkan agar tidak muncul lagi keluhan dari pihak kabupaten/kota yang bekerja sama terhadap pengelolaan TPA Piyungan.
5. Untuk meningkatkan kinerja kriteria pemerataan, lembaga kerja sama perlu segera merumuskan bentuk kompensasi bagi Kabupaten Bantul selaku wilayah yang paling terdampak apabila kondisi TPA Piyungan belum juga ditemukan solusi perbaikan kapasitasnya agar tidak muncul lagi keluhan di kemudian hari
6. Untuk meningkatkan kinerja kriteria kompetensi, lembaga kerja sama perlu segera melakukan optimalisasi TPS 3R di masing-masing kabupaten/kota untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Piyungan, segera merumuskan solusi penanganan dampak negatif bagi masyarakat di sepanjang rute armada pengangkutan sampah, dan berkoordinasi dengan pengelola TPA Piyungan terkait usulan solusi pengembangan TPA Piyungan yang mendekati kapasitas maksimal penampungannya
7. Untuk meningkatkan kinerja kriteria integrasi, lembaga kerja sama perlu memberi batasan yang jelas sejauh mana pemerintah kabupaten/kota dapat mengintervensi jalannya kerja sama dan perlu segera merumuskan sumber-sumber pendanaan lain non APBD agar kemandirian lembaga kerja sama dapat terwujud.

b. Penelitian lebih lanjut

Penelitian ini merupakan penelitian yang terbatas pada analisa kinerja lembaga kerja sama antardaerah dalam melakukan pengelolaan persampahan. Dari penelitian ini kemudian diketahui bagaimana kondisi kerja sama, tingkat kinerja, dan faktor penentu kinerja lembaga kerja sama antardaerah Kartamantul dalam pengelolaan persampahan. Adanya keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, mendorong untuk dimungkinkan adanya pengembangan pada penelitian lebih lanjut. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

- Penilaian dan analisis kinerja lembaga kerja sama antardaerah dalam pengelolaan persampahan berdasarkan penilaian dari pihak eksternal
- Penilaian dan analisis kinerja lembaga kerja sama antardaerah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dari standar yang berlaku secara internasional
- Penilaian dan analisis kinerja lembaga kerja sama antardaerah dalam melakukan pengelolaan pada sarana dan prasarana lainnya yang dikerja samakan

Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode penelitian dan teknik analisis yang berbeda kedepannya, karena penelitian ini telah menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis yaitu analisis skoring & pembobotan dan analisis deskriptif.